

Reformasi Struktural sebagai Kunci Peningkatan Ekonomi Indonesia

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD

www.rudyclt.com/cv.pdf

RudyCT Academic Series 2026

ARTIKEL ILMIAH

Reformasi Struktural sebagai Kunci Peningkatan Ekonomi Indonesia

8 PILAR REFORMASI STRUKTURAL

*Mendorong produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan
yang inklusif dan berkelanjutan*



- 1 Industrialisasi & Hilirisasi
- 2 Reformasi Regulasi
- 3 Investasi & Infrastruktur
- 4 SDM, Pendidikan & Kesehatan
- 5 Digitalisasi & Inovasi
- 6 UMKM & Inklusi Keuangan
- 7 Tata Kelola & Kelembagaan
- 8 Transisi Hijau & Energi

DAMPAK UTAMA REFORMASI STRUKTURAL



*Dari reformasi kebijakan menuju
transformasi ekonomi nasional*



Oleh: Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyc.com/cv.pdf

Kata Kunci

reformasi struktural; produktivitas; transformasi ekonomi; industrialisasi; modal manusia; tata kelola; ekonomi Indonesia; kebijakan publik; inklusi; Indonesia Emas 2045

Catatan Data Mutakhir

Artikel ini menggunakan angka pertumbuhan ekonomi 2025 dan triwulan I-2026 yang telah dipublikasikan BPS, serta penilaian Bank Dunia dan IMF yang tersedia hingga pertengahan 2026. Angka-angka tersebut diberi tahun rujukan agar pembaca dapat membedakan kondisi siklikal terbaru dari argumen struktural jangka panjang.

Daftar Isi

1. Pendahuluan: Pertumbuhan yang Bertahan, Transformasi yang Belum Tuntas
2. Makna Reformasi Struktural dalam Pembangunan Ekonomi
3. Diagnosis: Mengapa Pertumbuhan Lima Persen Belum Cukup
4. Produktivitas sebagai Inti Agenda Reformasi
5. Transformasi Struktural dan Industrialisasi Generasi Baru
6. Reformasi Regulasi dan Kepastian Berusaha
7. Persaingan Usaha dan Disiplin Pasar
8. Reformasi Pasar Tenaga Kerja: Fleksibilitas dengan Keamanan
9. Pendidikan, Keterampilan, dan Reformasi Modal Manusia
10. Kesehatan sebagai Infrastruktur Produktivitas
11. Reformasi Fiskal dan Kapasitas Negara
12. Desentralisasi Fiskal dan Reformasi Pemerintahan Daerah
13. Infrastruktur, Logistik, dan Konektivitas Kepulauan
14. Transformasi Digital sebagai Reformasi Ekonomi
15. UMKM, Formalisasi, dan Kenaikan Kelas
16. Reformasi Sektor Keuangan
17. Perdagangan, Investasi, dan Integrasi Rantai Nilai
18. Reformasi Agraria, Pertanian, dan Sistem Pangan
19. Transisi Energi dan Reformasi Ekonomi Hijau
20. Reformasi Perkotaan, Perumahan, dan Mobilitas
21. Tata Kelola, Meritokrasi, dan Kapasitas Birokrasi
22. Politik Ekonomi Reformasi: Pemenang, Pihak yang Dirugikan, dan Kompensasi
23. Strategi Implementasi: Dari Daftar Kebijakan ke Portofolio Transformasi
24. Prioritas Reformasi 2026-2030
25. Skenario Indonesia 2045
26. Kerangka Pengukuran Keberhasilan
27. Kesimpulan
28. Glossarium
29. Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Pertumbuhan yang Bertahan, Transformasi yang Belum Tuntas

Indonesia memasuki paruh kedua dekade 2020-an dengan ketahanan makroekonomi yang relatif baik. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, sedikit lebih tinggi daripada 5,03 persen pada 2024, sementara PDB per kapita mencapai sekitar Rp83,7 juta atau USD5.083,4. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan tahunan bahkan tercatat 5,61 persen, walaupun secara kuartalan terjadi kontraksi musiman. Angka-angka ini menunjukkan daya tahan permintaan domestik, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa struktur produksi telah berubah menuju produktivitas tinggi. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks pendahuluan: pertumbuhan yang bertahan, transformasi yang belum tuntas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Persoalan utama bukan apakah Indonesia mampu tumbuh sekitar lima persen, melainkan apakah pertumbuhan itu cukup cepat, berkualitas, inklusif, tahan guncangan, dan mampu menciptakan pekerjaan produktif bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi, komoditas, konstruksi, dan ekspansi sektor informal dapat menjaga aktivitas ekonomi, tetapi belum tentu menaikkan produktivitas total faktor, kompleksitas ekspor, kualitas pekerjaan, atau kemampuan inovasi perusahaan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks pendahuluan: pertumbuhan yang bertahan, transformasi yang belum tuntas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Reformasi struktural adalah perubahan mendasar terhadap aturan, institusi, insentif, dan kapasitas yang menentukan cara sumber daya dialokasikan. Reformasi tersebut mencakup pasar barang dan jasa, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, perpajakan, administrasi publik, persaingan usaha, perdagangan, investasi, keuangan, infrastruktur, inovasi, tata ruang, perlindungan sosial, dan transisi ekologis. Tujuannya bukan deregulasi tanpa batas, melainkan membangun sistem yang membuat modal, tenaga kerja, teknologi, dan pengetahuan bergerak menuju penggunaan yang lebih produktif dan berkeadilan. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks pendahuluan: pertumbuhan yang bertahan, transformasi yang belum tuntas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung

jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Artikel ini berargumen bahwa reformasi struktural merupakan kunci peningkatan ekonomi Indonesia karena kebijakan makro hanya dapat menjaga stabilitas dan mengelola siklus, sedangkan kenaikan kapasitas produksi jangka panjang bergantung pada produktivitas, kualitas manusia, institusi, inovasi, dan transformasi sektoral. Stabilitas adalah fondasi, tetapi struktur menentukan ketinggian bangunan ekonomi yang dapat didirikan di atasnya. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks pendahuluan: pertumbuhan yang bertahan, transformasi yang belum tuntas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai pendahuluan: pertumbuhan yang bertahan, transformasi yang belum tuntas memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

2. Makna Reformasi Struktural dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam literatur ekonomi pembangunan, reformasi struktural merujuk pada perubahan kebijakan dan kelembagaan yang meningkatkan efisiensi alokasi, produktivitas, kapasitas adaptasi, dan potensi pertumbuhan. Ia berbeda dari stimulus fiskal atau pelonggaran moneter yang terutama memengaruhi permintaan agregat dalam jangka pendek. Reformasi struktural bekerja lebih lambat, sering menimbulkan biaya transisi, tetapi efeknya lebih dalam karena mengubah perilaku perusahaan, rumah tangga, birokrasi, dan investor. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks makna reformasi struktural dalam pembangunan ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Reformasi yang baik harus menjawab tiga pertanyaan. Pertama, distorsi apa yang membuat sumber daya tertahan pada kegiatan berproduktivitas rendah? Kedua, institusi apa yang gagal menyediakan kepastian, kompetisi sehat, layanan publik, dan perlindungan sosial? Ketiga, bagaimana perubahan dilakukan tanpa memindahkan biaya secara tidak adil kepada kelompok yang lemah? Dengan demikian reformasi bukan agenda

teknokratis semata, melainkan proses politik-ekonomi yang menyangkut distribusi manfaat, beban, dan kekuasaan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks makna reformasi struktural dalam pembangunan ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Reformasi struktural juga tidak identik dengan penyeragaman resep global. Desainnya harus berangkat dari struktur demografi, geografi kepulauan, kapasitas fiskal, kualitas pemerintahan, komposisi industri, tingkat informalitas, dan posisi Indonesia dalam rantai nilai dunia. Kebijakan yang efektif di negara kecil dan homogen belum tentu sesuai bagi negara kepulauan besar dengan disparitas antardaerah dan jutaan unit usaha mikro. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks makna reformasi struktural dalam pembangunan ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Karena itu, ukuran keberhasilan reformasi tidak hanya berupa jumlah regulasi yang dipangkas atau peringkat kemudahan berusaha. Ukuran yang lebih substantif adalah kenaikan produktivitas, investasi berkualitas, formalitas usaha, upah riil, mobilitas sosial, partisipasi perempuan, kualitas pembelajaran, penerimaan pajak, inovasi, diversifikasi ekspor, dan penurunan kesenjangan wilayah. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks makna reformasi struktural dalam pembangunan ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai makna reformasi struktural dalam pembangunan ekonomi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

3. Diagnosis: Mengapa Pertumbuhan Lima Persen Belum Cukup

Pertumbuhan sekitar lima persen merupakan capaian penting, tetapi belum memadai untuk mempercepat konvergensi menuju negara berpendapatan tinggi. Indonesia masih menghadapi produktivitas yang melambat, dominasi pekerjaan informal, kualitas pembelajaran yang timpang, kedalaman keuangan terbatas, biaya logistik tinggi, dan kompleksitas regulasi. Ketika pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal tidak lagi secepat sebelumnya, sumber pertumbuhan harus bergeser menuju produktivitas dan inovasi. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks diagnosis: mengapa pertumbuhan lima persen belum cukup, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Bank Dunia pada 2025 dan 2026 menekankan bahwa reformasi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dapat membuka pertumbuhan yang lebih tinggi serta menciptakan pekerjaan yang lebih baik. IMF juga menilai bahwa pertumbuhan Indonesia tetap kuat, tetapi reformasi berani diperlukan untuk memperkuat iklim usaha, pertumbuhan yang dipimpin sektor swasta, produktivitas, dan penciptaan pekerjaan. Pesan yang konsisten adalah bahwa ketahanan makro perlu diterjemahkan menjadi kapasitas mikro yang lebih produktif. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks diagnosis: mengapa pertumbuhan lima persen belum cukup, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pertumbuhan lima persen dapat terasa berbeda bagi kelompok sosial yang berbeda. Perusahaan besar yang terhubung dengan komoditas, keuangan, dan infrastruktur mungkin berkembang cepat, sedangkan pekerja muda, rumah tangga kelas menengah rentan, dan UMKM menghadapi upah stagnan, biaya hidup, keterbatasan pembiayaan, serta ketidakpastian kerja. Jika kualitas pekerjaan tertinggal, angka pertumbuhan tidak otomatis menjadi rasa aman ekonomi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks diagnosis: mengapa pertumbuhan lima persen belum cukup, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Diagnosis yang tepat mencegah reformasi berubah menjadi daftar proyek. Masalah Indonesia bukan kekurangan inisiatif, melainkan fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi, insentif yang bertentangan, dan kesenjangan implementasi. Reformasi harus menghubungkan tujuan nasional dengan mekanisme

pelaksanaan, anggaran, indikator hasil, akuntabilitas, dan umpan balik. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks diagnosis: mengapa pertumbuhan lima persen belum cukup, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai diagnosis: mengapa pertumbuhan lima persen belum cukup memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

4. Produktivitas sebagai Inti Agenda Reformasi

Produktivitas menunjukkan seberapa efektif tenaga kerja, modal, energi, tanah, dan pengetahuan diubah menjadi nilai tambah. Dalam jangka panjang, kenaikan pendapatan per kapita tidak dapat terus bergantung pada penambahan jam kerja, eksploitasi sumber daya, atau ekspansi kredit. Produktivitas harus meningkat melalui teknologi, keterampilan, manajemen, skala usaha, persaingan, infrastruktur, dan institusi yang lebih baik. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks produktivitas sebagai inti agenda reformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Produktivitas agregat dapat naik melalui dua mekanisme. Pertama, produktivitas di dalam perusahaan atau sektor meningkat karena adopsi teknologi dan praktik manajemen. Kedua, tenaga kerja dan modal berpindah dari kegiatan berproduktivitas rendah menuju kegiatan yang lebih produktif. Indonesia membutuhkan keduanya. Digitalisasi pabrik tanpa mobilitas tenaga kerja tidak cukup, dan perpindahan tenaga kerja tanpa perusahaan produktif juga tidak menciptakan transformasi. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks produktivitas sebagai inti agenda reformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman

reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kebijakan produktivitas perlu membangun ekosistem difusi teknologi, bukan hanya mendukung segelintir juara nasional. Banyak perusahaan kecil tidak mengadopsi teknologi karena kekurangan keterampilan, pembiayaan, standar, informasi, dan pasar. Pusat ekstensi teknologi, layanan diagnostik produktivitas, insentif pelatihan, laboratorium bersama, dan kemitraan universitas-industri dapat memperluas manfaat inovasi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks produktivitas sebagai inti agenda reformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pengukuran produktivitas juga harus diperbaiki. Pemerintah memerlukan data perusahaan yang terintegrasi, aman, dan dapat dianalisis untuk membedakan hambatan berdasarkan sektor, ukuran, lokasi, serta usia perusahaan. Tanpa diagnosis mikro, kebijakan industri mudah menjadi subsidi umum yang mahal dan sulit dievaluasi. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks produktivitas sebagai inti agenda reformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai produktivitas sebagai inti agenda reformasi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

5. Transformasi Struktural dan Industrialisasi Generasi Baru

Transformasi struktural secara klasik berarti perpindahan tenaga kerja dari pertanian tradisional menuju manufaktur dan jasa modern. Namun industrialisasi abad ke-21 berbeda dari masa lalu. Otomasi, ekonomi digital, jasa yang dapat diperdagangkan, standar lingkungan, dan fragmentasi rantai pasok mengubah jalan menuju produktivitas tinggi. Indonesia tetap membutuhkan manufaktur, tetapi manufaktur harus terhubung

dengan desain, data, logistik, layanan purna jual, energi bersih, dan riset. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks transformasi struktural dan industrialisasi generasi baru, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Hilirisasi sumber daya alam dapat menjadi pintu masuk, tetapi tidak boleh berhenti pada pemrosesan tahap awal. Nilai tambah tertinggi sering berada pada rekayasa, bahan maju, komponen, perangkat lunak, merek, pembiayaan, dan layanan. Strategi industri harus mendorong pendalaman rantai nilai, keterkaitan pemasok domestik, peningkatan standar, transfer keterampilan, dan diversifikasi produk. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks transformasi struktural dan industrialisasi generasi baru, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Risiko industrialisasi berbasis komoditas adalah ketergantungan pada harga dunia, konsentrasi pasar, tekanan lingkungan, dan enclaves yang lemah kaitannya dengan ekonomi lokal. Karena itu insentif industri harus bersyarat pada kinerja: investasi riset, penggunaan pemasok yang kompetitif, pengembangan tenaga kerja, efisiensi energi, ekspor, serta kepatuhan lingkungan. Perlindungan tanpa disiplin dapat mempertahankan perusahaan tidak efisien. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks transformasi struktural dan industrialisasi generasi baru, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Industrialisasi generasi baru juga mencakup agroindustri, bioekonomi, industri kesehatan, maritim, peralatan energi terbarukan, elektronik, pusat data, industri kreatif, dan jasa profesional. Portofolio yang beragam mengurangi risiko dan membuka jalur produktivitas bagi berbagai wilayah Indonesia. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks transformasi struktural dan industrialisasi generasi baru, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung

jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai transformasi struktural dan industrialisasi generasi baru memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

6. Reformasi Regulasi dan Kepastian Berusaha

Regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat, lingkungan, persaingan, dan stabilitas. Masalah muncul ketika peraturan tumpang tindih, berubah tanpa transisi, memiliki interpretasi berbeda, atau menciptakan biaya kepatuhan yang tidak proporsional. Kepastian berusaha bukan ketiadaan aturan, melainkan aturan yang jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan ditegakkan secara adil. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi regulasi dan kepastian berusaha, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Reformasi regulasi harus bergerak dari pendekatan pemangkasan administratif menuju manajemen kualitas regulasi. Setiap regulasi penting perlu memiliki analisis dampak, konsultasi publik, penilaian biaya-manfaat, mekanisme keberatan, periode transisi, dan evaluasi pascapenerapan. Regulasi yang baik juga harus mudah ditemukan dalam portal tunggal dengan versi yang sah dan riwayat perubahan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi regulasi dan kepastian berusaha, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Digitalisasi perizinan dapat mengurangi waktu dan kontak langsung, tetapi digitalisasi proses yang buruk hanya memindahkan birokrasi ke layar. Reformasi memerlukan penyederhanaan alur, interoperabilitas data, prinsip sekali menyerahkan data, standar layanan, serta tanggung jawab jelas ketika sistem gagal. Pelaku UMKM membutuhkan antarmuka sederhana dan bantuan, bukan hanya kewajiban digital. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi regulasi dan kepastian berusaha, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh

berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kepastian hukum juga mencakup penyelesaian sengketa, hak kepemilikan, kontrak, kepailitan, dan konsistensi kebijakan pusat-daerah. Investor produktif menilai tidak hanya tarif pajak, tetapi kemampuan sistem melindungi investasi jangka panjang dan menyelesaikan masalah tanpa biaya informal. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi regulasi dan kepastian berusaha, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi regulasi dan kepastian berusaha memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

7. Persaingan Usaha dan Disiplin Pasar

Persaingan mendorong perusahaan menurunkan biaya, meningkatkan mutu, mengadopsi teknologi, dan mencari pasar baru. Ketika pasar terlalu terkonsentrasi atau akses ditentukan oleh kedekatan politik, sumber daya mengalir kepada pelaku yang memiliki kekuatan, bukan produktivitas. Reformasi struktural harus memperkuat kebijakan persaingan sekaligus mencegah dominasi platform dan integrasi vertikal yang merugikan pemasok kecil. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks persaingan usaha dan disiplin pasar, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kebijakan persaingan tidak hanya soal penindakan kartel. Ia mencakup desain pengadaan publik, netralitas antara BUMN dan swasta, akses infrastruktur esensial, transparansi subsidi, portabilitas data, standardisasi,

dan kemudahan masuk-keluar pasar. Hambatan keluar sama pentingnya dengan hambatan masuk karena proses kepailitan yang lambat menahan aset pada perusahaan tidak produktif. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks persaingan usaha dan disiplin pasar, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

BUMN memiliki peran strategis dalam infrastruktur, layanan dasar, dan stabilisasi, tetapi mandat komersial dan publik perlu dipisahkan secara transparan. Kompensasi atas penugasan publik harus jelas, tata kelola profesional diperkuat, dan perusahaan yang beroperasi di pasar kompetitif tunduk pada disiplin yang setara. Tujuannya bukan privatisasi otomatis, melainkan akuntabilitas atas modal negara. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks persaingan usaha dan disiplin pasar, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Persaingan juga harus disertai perlindungan konsumen. Pasar yang dinamis memerlukan informasi, keamanan produk, privasi data, dan mekanisme pemulihan kerugian. Kepercayaan konsumen adalah aset struktural yang mendukung ekonomi digital dan inovasi. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks persaingan usaha dan disiplin pasar, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai persaingan usaha dan disiplin pasar memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

8. Reformasi Pasar Tenaga Kerja: Fleksibilitas dengan Keamanan

Pasar tenaga kerja Indonesia ditandai oleh informalitas tinggi, perlindungan yang terfragmentasi, kesenjangan keterampilan, dan produktivitas yang berbeda tajam. Reformasi perlu menghindari dikotomi antara fleksibilitas dan perlindungan. Perusahaan membutuhkan kemampuan menyesuaikan organisasi, sementara pekerja membutuhkan pendapatan, jaminan sosial, keterampilan, dan peluang transisi. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi pasar tenaga kerja: fleksibilitas dengan keamanan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Konsep flexicurity menawarkan arah: aturan kerja yang adaptif disertai asuransi kehilangan pekerjaan, layanan penempatan, pelatihan, portabilitas manfaat, dan dialog sosial. Perlindungan sebaiknya semakin melekat pada pekerja, bukan hanya pada status hubungan kerja tertentu. Hal ini penting bagi pekerja platform, kontrak, paruh waktu, dan wiraswasta. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi pasar tenaga kerja: fleksibilitas dengan keamanan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kebijakan upah minimum perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup, produktivitas, kondisi daerah, dan daya serap kerja. Namun upah tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen kesejahteraan. Perumahan terjangkau, transportasi publik, kesehatan, penitipan anak, dan perlindungan sosial dapat meningkatkan pendapatan riil tanpa menekan seluruh biaya melalui pengusaha. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi pasar tenaga kerja: fleksibilitas dengan keamanan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Reformasi juga harus meningkatkan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok muda. Investasi pada layanan pengasuhan, keamanan transportasi, kerja fleksibel, anti-diskriminasi, dan pengakuan keterampilan dapat memperluas basis tenaga kerja produktif. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi pasar tenaga kerja: fleksibilitas dengan keamanan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak;

menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi pasar tenaga kerja: fleksibilitas dengan keamanan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

9. Pendidikan, Keterampilan, dan Reformasi Modal Manusia

Bonus demografi hanya menjadi dividen apabila penduduk memiliki kesehatan, keterampilan, dan kesempatan kerja produktif. Reformasi pendidikan harus bergeser dari orientasi input dan sertifikat menuju hasil pembelajaran, kemampuan bernalar, literasi digital, karakter, komunikasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks pendidikan, keterampilan, dan reformasi modal manusia, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Masalah keterampilan bukan hanya jumlah lulusan, tetapi ketidakcocokan antara kurikulum, teknologi, dan kebutuhan kerja. Pendidikan vokasi perlu dibangun melalui kemitraan nyata dengan industri, standar kompetensi yang dapat diperbarui, instruktur berpengalaman, magang bermutu, dan sertifikasi yang diakui lintas perusahaan. Kemitraan tidak boleh menjadi seremoni; perusahaan harus ikut merancang, menyediakan peralatan, dan mengevaluasi. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks pendidikan, keterampilan, dan reformasi modal manusia, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Perguruan tinggi memerlukan reformasi insentif agar penelitian, pengajaran, dan pengabdian terhubung dengan masalah pembangunan tanpa kehilangan kebebasan akademik. Pendanaan kompetitif, laboratorium bersama, mobilitas peneliti, kantor transfer teknologi, dan kolaborasi internasional dapat meningkatkan kapasitas

inovasi. Namun kualitas dasar pengajaran tetap harus menjadi prioritas. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks pendidikan, keterampilan, dan reformasi modal manusia, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pembelajaran sepanjang hayat membutuhkan akun pelatihan individu, micro-credentials yang bermutu, pengakuan pembelajaran lampau, dan informasi pasar kerja. Negara perlu memastikan pelatihan tidak menjadi industri sertifikat tanpa dampak. Evaluasi harus mengukur penempatan kerja, kenaikan pendapatan, dan produktivitas. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks pendidikan, keterampilan, dan reformasi modal manusia, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai pendidikan, keterampilan, dan reformasi modal manusia memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

10. Kesehatan sebagai Infrastruktur Produktivitas

Kesehatan bukan sekadar sektor sosial, melainkan infrastruktur produktivitas. Stunting, penyakit tidak menular, kesehatan mental, polusi, dan akses layanan yang timpang mengurangi kemampuan belajar dan bekerja. Reformasi kesehatan harus menguatkan pencegahan, pelayanan primer, pembiayaan berkelanjutan, kualitas klinis, dan pemerataan tenaga kesehatan. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks kesehatan sebagai infrastruktur produktivitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Jaminan kesehatan universal perlu dijaga melalui tata kelola klaim, pembayaran berbasis hasil, rujukan efektif, digitalisasi rekam medis, dan pengadaan transparan. Efisiensi bukan berarti mengurangi layanan penting, tetapi mengalihkan sumber daya dari tindakan bernilai rendah menuju intervensi yang paling berdampak. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks kesehatan sebagai infrastruktur produktivitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Industri kesehatan juga memiliki potensi struktural: farmasi, alat kesehatan, bioteknologi, data kesehatan, dan layanan medis. Kebijakan substitusi impor perlu dipadukan dengan standar kualitas, riset, pengujian, dan akses pasar global. Produksi domestik yang tidak kompetitif dapat meningkatkan biaya sistem kesehatan. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks kesehatan sebagai infrastruktur produktivitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kesehatan kerja harus menjadi bagian dari strategi produktivitas perusahaan. Pencegahan kecelakaan, ergonomi, manajemen kelelahan, kesehatan mental, dan lingkungan kerja sehat menurunkan biaya tersembunyi berupa absensi, turnover, serta penurunan kualitas. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks kesehatan sebagai infrastruktur produktivitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai kesehatan sebagai infrastruktur produktivitas memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

11. Reformasi Fiskal dan Kapasitas Negara

Negara yang ingin melakukan transformasi memerlukan kapasitas fiskal. Penerimaan pajak Indonesia relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan, sehingga reformasi harus memperluas basis, memperbaiki administrasi, mengurangi penghindaran, dan meninjau belanja pajak. Kenaikan penerimaan harus dilakukan adil dan tidak mematikan formalisasi usaha kecil. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi fiskal dan kapasitas negara, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Digitalisasi administrasi pajak memungkinkan pencocokan data dan pelayanan lebih baik, tetapi memerlukan tata kelola data, keamanan, mekanisme koreksi, dan perlindungan hak wajib pajak. Kepercayaan meningkat ketika aturan sederhana, sengketa diselesaikan cepat, dan penggunaan penerimaan terlihat dalam layanan publik. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi fiskal dan kapasitas negara, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Di sisi belanja, reformasi harus menggeser orientasi dari penyerapan menuju hasil. Program perlu memiliki teori perubahan, indikator, baseline, evaluasi, dan keputusan penghentian jika tidak efektif. Anggaran lintas kementerian harus mengatasi masalah yang bersifat lintas sektor, bukan mengikuti batas organisasi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi fiskal dan kapasitas negara, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Subsidi perlu diarahkan secara lebih tepat. Subsidi harga yang luas sering dinikmati kelompok berpendapatan lebih tinggi dan mengurangi ruang untuk pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Peralihan menuju dukungan terarah harus dilakukan bertahap, transparan, dan disertai kompensasi agar tidak menimbulkan guncangan sosial. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi fiskal dan kapasitas negara, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana

dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi fiskal dan kapasitas negara memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

12. Desentralisasi Fiskal dan Reformasi Pemerintahan Daerah

Desentralisasi membawa keputusan lebih dekat kepada masyarakat, tetapi hasilnya beragam karena kapasitas, pendapatan, dan tata kelola daerah berbeda. Reformasi struktural harus memperkuat hubungan pusat-daerah, standar pelayanan, insentif transfer, dan akuntabilitas lokal. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Transfer fiskal sebaiknya memberi insentif terhadap hasil, bukan sekadar formula input. Daerah yang meningkatkan kualitas layanan, basis pajak, kemudahan berusaha, dan pengelolaan lingkungan dapat memperoleh penghargaan, sementara daerah tertinggal tetap menerima dukungan pemerataan. Desain harus mencegah daerah kaya sumber daya bergantung pada rente. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Banyak hambatan investasi muncul pada tata ruang, izin lokal, pengadaan lahan, dan koordinasi utilitas. Sistem tata ruang digital, data bidang tanah, konsultasi publik, dan penyelesaian konflik harus diperkuat. Kepastian tidak boleh mengorbankan hak masyarakat adat atau lingkungan. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh

berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kapasitas birokrasi daerah membutuhkan meritokrasi, pelatihan, mobilitas talenta, dan layanan bersama. Tidak semua daerah perlu membangun sistem sendiri; platform nasional dapat menyediakan fungsi digital, pengadaan, data, dan keamanan dengan ruang adaptasi lokal. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

13. Infrastruktur, Logistik, dan Konektivitas Kepulauan

Sebagai negara kepulauan, biaya konektivitas merupakan faktor struktural. Infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, kereta, listrik, air, dan telekomunikasi harus dipandang sebagai jaringan, bukan proyek terpisah. Nilai infrastruktur muncul ketika simpul terhubung dengan kawasan produksi, pasar, dan layanan. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks infrastruktur, logistik, dan konektivitas kepulauan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Reformasi logistik mencakup standarisasi dokumen, interoperabilitas sistem pelabuhan, jadwal yang dapat diprediksi, kompetisi layanan, gudang, cold chain, dan konsolidasi kargo. Infrastruktur fisik tanpa reformasi proses dapat menghasilkan aset mahal dengan waktu tunggu tinggi. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan

bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks infrastruktur, logistik, dan konektivitas kepulauan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pemilihan proyek harus didasarkan pada manfaat sosial-ekonomi, biaya siklus hidup, ketahanan iklim, dan dampak wilayah. Proyek prestisius dapat menyerap anggaran tetapi tidak selalu memiliki pengganda terbesar. Pemeliharaan perlu memperoleh bobot yang setara dengan pembangunan baru. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks infrastruktur, logistik, dan konektivitas kepulauan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kemitraan pemerintah-swasta dapat membantu pembiayaan, tetapi risiko harus dialokasikan kepada pihak yang mampu mengelolanya. Transparansi kontrak, kewajiban kontinjensi, dan evaluasi value for money penting agar proyek tidak menjadi utang tersembunyi. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks infrastruktur, logistik, dan konektivitas kepulauan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai infrastruktur, logistik, dan konektivitas kepulauan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

14. Transformasi Digital sebagai Reformasi Ekonomi

Digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas pasar, meningkatkan transparansi, dan menciptakan model bisnis baru. Namun transformasi digital bukan sekadar menyediakan aplikasi. Ia

membutuhkan identitas digital, pembayaran, interoperabilitas, konektivitas, keamanan siber, perlindungan data, dan kompetisi platform. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks transformasi digital sebagai reformasi ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Fondasi digital publik dapat memungkinkan layanan pemerintah dan swasta dibangun lebih cepat. Prinsipnya adalah modular, terbuka, aman, dan berorientasi pada warga. Interoperabilitas mengurangi pengulangan data, tetapi harus disertai batas penggunaan, persetujuan, audit, dan mekanisme pemulihan ketika data salah. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks transformasi digital sebagai reformasi ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kesenjangan digital memiliki dimensi akses, perangkat, keterampilan, bahasa, gender, dan kepercayaan. Pembangunan jaringan harus diikuti literasi dan dukungan penggunaan produktif. Jika tidak, digitalisasi dapat memperbesar keunggulan perusahaan dan wilayah yang telah maju. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks transformasi digital sebagai reformasi ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kecerdasan buatan menambah urgensi reformasi. Perusahaan membutuhkan data berkualitas, talenta, tata kelola model, dan keamanan. Negara memerlukan kerangka berbasis risiko yang melindungi masyarakat tanpa membekukan inovasi. Pengadaan AI oleh pemerintah harus transparan dan dapat diaudit. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks transformasi digital sebagai reformasi ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai transformasi digital sebagai reformasi ekonomi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

15. UMKM, Formalisasi, dan Kenaikan Kelas

UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi banyak berada pada skala mikro dengan produktivitas, modal, dan akses pasar terbatas. Reformasi tidak boleh memandang UMKM sebagai kategori permanen yang harus selalu dilindungi, melainkan sebagai spektrum perusahaan yang perlu diberi jalur untuk tumbuh. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks umkm, formalisasi, dan kenaikan kelas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Formalisasi akan terjadi apabila manfaatnya melebihi biaya. Registrasi sederhana harus disertai akses pembiayaan, pengadaan, perlindungan sosial, pelatihan, dan penyelesaian sengketa. Jika formalitas hanya menambah pajak dan kewajiban, usaha akan tetap informal. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks umkm, formalisasi, dan kenaikan kelas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pembiayaan UMKM perlu bergerak dari agunan menuju arus kas, data transaksi, invoice financing, dan penjaminan yang disiplin. Kredit bersubsidi dapat membantu, tetapi perlu mencegah ketergantungan dan salah sasaran. Pendampingan manajemen sering sama pentingnya dengan modal. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks umkm, formalisasi, dan kenaikan kelas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab

itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kenaikan kelas juga memerlukan agregasi dan jaringan. Koperasi modern, klaster, platform ekspor, standar bersama, dan kemitraan pemasok dapat memberikan skala tanpa menghilangkan kepemilikan. Kebijakan harus mengukur apakah UMKM meningkatkan produktivitas, bukan hanya jumlah penerima bantuan. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks umkm, formalisasi, dan kenaikan kelas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai umkm, formalisasi, dan kenaikan kelas memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

16. Reformasi Sektor Keuangan

Sektor keuangan menghubungkan tabungan dengan investasi. Kedalaman keuangan yang terbatas membuat perusahaan bergantung pada dana internal atau kredit bank jangka pendek. Reformasi perlu mengembangkan pasar obligasi, modal ventura, pembiayaan proyek, asuransi, dana pensiun, dan instrumen hijau. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi sektor keuangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Inklusi keuangan harus dinilai dari penggunaan yang aman dan produktif, bukan hanya kepemilikan rekening. Kredit digital dapat memperluas akses tetapi juga menimbulkan risiko bunga tinggi, penipuan, dan penggunaan data. Perlindungan konsumen, literasi, dan pengawasan berbasis aktivitas sangat penting. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi sektor keuangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman

reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pembiayaan inovasi memerlukan toleransi terhadap kegagalan dan horizon panjang. Skema dana pendamping, jaminan portofolio, sandbox, dan insentif investor institusional dapat membantu, asalkan keputusan investasi tetap profesional dan tidak dipolitisasi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi sektor keuangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Stabilitas keuangan tetap menjadi prasyarat. Reformasi struktural tidak boleh mendorong pertumbuhan kredit tanpa kualitas. Pengawasan makroprudensial, resolusi bank, keamanan siber, dan koordinasi lembaga harus mengikuti kompleksitas sistem. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi sektor keuangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi sektor keuangan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

17. Perdagangan, Investasi, dan Integrasi Rantai Nilai

Keterbukaan perdagangan memungkinkan perusahaan mengakses input, teknologi, pasar, dan kompetisi. Proteksi selektif kadang dibutuhkan untuk tujuan strategis, tetapi pembatasan input dapat menaikkan biaya bagi industri hilir. Kebijakan perdagangan harus menilai dampak sepanjang rantai nilai, bukan hanya satu sektor. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks perdagangan, investasi, dan integrasi rantai nilai, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan

dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Perjanjian perdagangan memberi manfaat ketika perusahaan domestik mampu memenuhi standar, logistik, dan skala. Karena itu diplomasi perdagangan harus terhubung dengan layanan ekspor, sertifikasi, pembiayaan, dan intelijen pasar. UMKM tidak otomatis mengeksport hanya karena tarif turun. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks perdagangan, investasi, dan integrasi rantai nilai, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Investasi asing langsung dapat membawa modal, teknologi, jaringan, dan keterampilan. Namun spillover tidak terjadi otomatis. Program pengembangan pemasok, mobilitas tenaga ahli, riset bersama, dan standar lokal yang realistis diperlukan. Persyaratan kandungan lokal yang kaku dapat mengurangi daya saing jika pemasok belum siap. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks perdagangan, investasi, dan integrasi rantai nilai, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Indonesia perlu mengelola ketegangan antara kedaulatan ekonomi dan integrasi global secara pragmatis. Kedaulatan yang kuat berasal dari kapasitas teknologi, fiskal, dan perusahaan domestik, bukan isolasi. Diversifikasi mitra mengurangi risiko geopolitik. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks perdagangan, investasi, dan integrasi rantai nilai, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai perdagangan, investasi, dan integrasi rantai nilai memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah

insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

18. Reformasi Agraria, Pertanian, dan Sistem Pangan

Produktivitas pertanian dipengaruhi oleh skala lahan, kepastian hak, irigasi, benih, penyuluhan, pembiayaan, logistik, dan akses pasar. Reformasi agraria harus menggabungkan legalisasi aset dengan konsolidasi produktif, perlindungan petani, dan tata ruang yang berkelanjutan. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi agraria, pertanian, dan sistem pangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kebijakan pangan sering terjebak antara stabilisasi harga konsumen dan pendapatan produsen. Instrumen perlu dibedakan: cadangan untuk guncangan, bantuan untuk rumah tangga, asuransi untuk petani, dan investasi untuk produktivitas. Larangan impor mendadak dapat menimbulkan volatilitas dan memberi rente. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi agraria, pertanian, dan sistem pangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Digitalisasi pertanian dapat mendukung informasi cuaca, harga, traceability, dan pembiayaan, tetapi tidak menggantikan penyuluh, infrastruktur, serta organisasi petani. Teknologi harus dirancang sesuai skala dan kemampuan pengguna. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi agraria, pertanian, dan sistem pangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Transformasi pangan mencakup agroindustri, cold chain, keamanan pangan, dan pengurangan kehilangan. Nilai tambah dapat tumbuh di daerah jika kebijakan menghubungkan produksi primer dengan pengolahan dan pasar. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi agraria, pertanian, dan

sistem pangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi agraria, pertanian, dan sistem pangan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

19. Transisi Energi dan Reformasi Ekonomi Hijau

Perubahan iklim dan transisi energi mengubah daya saing. Industri yang bergantung pada energi karbon tinggi menghadapi risiko biaya, standar perbatasan, dan aset terlanjur. Reformasi energi perlu mempercepat energi terbarukan, jaringan, penyimpanan, efisiensi, dan elektrifikasi dengan menjaga keterjangkauan serta keandalan. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks transisi energi dan reformasi ekonomi hijau, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Harga energi seharusnya secara bertahap mencerminkan biaya ekonomi dan lingkungan, tetapi reformasi subsidi harus melindungi rumah tangga rentan dan usaha kecil. Kompensasi langsung lebih transparan daripada harga murah universal, meskipun memerlukan data yang akurat. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks transisi energi dan reformasi ekonomi hijau, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Transisi adil berarti pekerja dan wilayah yang bergantung pada batu bara atau industri intensif karbon memperoleh jalur baru. Pelatihan, diversifikasi ekonomi lokal, rehabilitasi, dan dialog harus dimulai sebelum

penutupan aset. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks transisi energi dan reformasi ekonomi hijau, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Ekonomi hijau juga membuka industri baru: kendaraan listrik, baterai, panas bumi, bioekonomi, material rendah karbon, jasa audit, dan pembiayaan hijau. Kebijakan industri harus memastikan manfaat teknologi, lingkungan, dan sosial, bukan sekadar volume investasi. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks transisi energi dan reformasi ekonomi hijau, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai transisi energi dan reformasi ekonomi hijau memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

20. Reformasi Perkotaan, Perumahan, dan Mobilitas

Kota adalah mesin produktivitas karena mempertemukan perusahaan, pekerja, pengetahuan, dan layanan. Namun kemacetan, perumahan mahal, banjir, polusi, dan tata ruang terfragmentasi mengurangi manfaat aglomerasi. Reformasi perkotaan adalah agenda ekonomi nasional. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi perkotaan, perumahan, dan mobilitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Perumahan terjangkau sebaiknya dipandang sebagai infrastruktur tenaga kerja. Ketika pekerja tinggal jauh dari pusat pekerjaan, biaya waktu dan transportasi menurunkan produktivitas dan kesejahteraan. Kebijakan perlu

menghubungkan pembiayaan perumahan, penyediaan tanah, transportasi massal, dan kepadatan yang tepat. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi perkotaan, perumahan, dan mobilitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pemerintah metropolitan memerlukan koordinasi lintas batas administratif. Transportasi, air, limbah, dan kualitas udara tidak berhenti pada batas kota. Otoritas bersama, pembagian pendapatan, dan data regional diperlukan. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi perkotaan, perumahan, dan mobilitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Peningkatan nilai tanah akibat infrastruktur dapat membantu pembiayaan melalui land value capture yang transparan. Namun perlindungan terhadap penggusuran dan spekulasi harus kuat agar pembangunan tidak mengusir kelompok berpendapatan rendah. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi perkotaan, perumahan, dan mobilitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi perkotaan, perumahan, dan mobilitas memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

21. Tata Kelola, Meritokrasi, dan Kapasitas Birokrasi

Reformasi ekonomi gagal bila institusi pelaksana lemah. Kapasitas negara mencakup kemampuan merumuskan kebijakan, mengumpulkan penerimaan, mengelola proyek, mengatur pasar, menyediakan layanan, dan belajar dari hasil. Struktur organisasi yang besar tidak sama dengan kapasitas. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks tata kelola, meritokrasi, dan kapasitas birokrasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Meritokrasi memerlukan rekrutmen terbuka, promosi berbasis kompetensi, evaluasi kinerja, mobilitas, dan perlindungan profesional dari intervensi. Talenta digital, ekonomi, teknik, kesehatan, dan lingkungan harus dapat masuk dan berkembang dalam layanan publik. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks tata kelola, meritokrasi, dan kapasitas birokrasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Koordinasi lintas kementerian sering menjadi titik lemah. Unit koordinasi harus memiliki mandat, data, dan kemampuan menyelesaikan konflik, bukan hanya mengadakan rapat. Prioritas nasional perlu diterjemahkan menjadi hasil bersama dan anggaran yang terhubung. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks tata kelola, meritokrasi, dan kapasitas birokrasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Antikorupsi adalah kebijakan produktivitas. Korupsi menaikkan biaya, menurunkan kualitas proyek, dan menguntungkan perusahaan yang memiliki koneksi. Pencegahan melalui desain proses, transparansi, pengadaan elektronik, audit data, dan perlindungan pelapor harus berjalan bersama penegakan hukum. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks tata kelola, meritokrasi, dan kapasitas birokrasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal

ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai tata kelola, meritokrasi, dan kapasitas birokrasi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

22. Politik Ekonomi Reformasi: Pemenang, Pihak yang Dirugikan, dan Kompensasi

Reformasi struktural menciptakan pemenang dan pihak yang menanggung biaya. Deregulasi dapat menguntungkan pendatang baru tetapi mengurangi rente pelaku lama. Reformasi subsidi membantu fiskal tetapi menaikkan harga. Penutupan industri tidak produktif membebaskan sumber daya tetapi mengguncang pekerja dan daerah. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks politik ekonomi reformasi: pemenang, pihak yang dirugikan, dan kompensasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Karena itu, desain teknis harus disertai strategi koalisi dan kompensasi. Pemerintah perlu menjelaskan masalah, manfaat, jadwal, serta perlindungan. Transparansi mengurangi ruang disinformasi. Kompensasi harus tepat sasaran dan bersifat transisi, bukan menciptakan distorsi baru permanen. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks politik ekonomi reformasi: pemenang, pihak yang dirugikan, dan kompensasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Urutan reformasi menentukan hasil. Pemerintah sebaiknya membangun kapasitas perlindungan sosial dan layanan transisi sebelum menghapus perlindungan lama. Reformasi yang menghasilkan manfaat cepat dapat membangun kepercayaan untuk perubahan yang lebih sulit. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks

politik ekonomi reformasi: pemenang, pihak yang dirugikan, dan kompensasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Dialog sosial bukan hambatan, melainkan mekanisme memperoleh informasi dan legitimasi. Serikat pekerja, asosiasi usaha, daerah, akademisi, dan masyarakat perlu dilibatkan dengan aturan yang mencegah veto oleh kepentingan sempit. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks politik ekonomi reformasi: pemenang, pihak yang dirugikan, dan kompensasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai politik ekonomi reformasi: pemenang, pihak yang dirugikan, dan kompensasi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

23. Strategi Implementasi: Dari Daftar Kebijakan ke Portofolio Transformasi

Indonesia tidak kekurangan dokumen strategi. Tantangannya adalah mengubah agenda luas menjadi portofolio reformasi yang berurutan, dibiayai, dan dapat dievaluasi. Setiap reformasi harus memiliki pemilik, target hasil, milestone, risiko, dan mekanisme eskalasi. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks strategi implementasi: dari daftar kebijakan ke portofolio transformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pendekatan portofolio membedakan reformasi fondasi, akselerator, dan perlindungan. Fondasi mencakup data, regulasi, birokrasi, pendidikan dasar, dan fiskal. Akselerator mencakup industri, digital, perdagangan, dan pembiayaan. Perlindungan mencakup jaminan sosial, transisi pekerja, dan lingkungan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks strategi implementasi: dari daftar kebijakan ke portofolio transformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pilot dapat digunakan, tetapi harus dirancang untuk pembelajaran dan skalabilitas. Program percontohan yang berhasil karena dukungan luar biasa mungkin tidak dapat diperluas. Evaluasi perlu menguji biaya, kapasitas, dan variasi daerah. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks strategi implementasi: dari daftar kebijakan ke portofolio transformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Dashboard reformasi harus mengukur outcome, bukan aktivitas. Jumlah izin digital bukan tujuan jika waktu dan biaya tetap tinggi. Jumlah peserta pelatihan bukan keberhasilan jika tidak bekerja. Indikator harus disertai audit independen dan publikasi rutin. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks strategi implementasi: dari daftar kebijakan ke portofolio transformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai strategi implementasi: dari daftar kebijakan ke portofolio transformasi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesiadaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

24. Prioritas Reformasi 2026-2030

Dalam horizon 2026-2030, prioritas pertama adalah memperkuat produktivitas perusahaan dan penciptaan kerja formal melalui penyederhanaan regulasi berkualitas, persaingan, pembiayaan, teknologi, dan pengembangan pemasok. Prioritas kedua adalah modal manusia: pembelajaran dasar, vokasi, kesehatan, dan perlindungan transisi. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks prioritas reformasi 2026-2030, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Prioritas ketiga adalah kapasitas fiskal dan negara. Administrasi pajak, kualitas belanja, meritokrasi, data, dan koordinasi menentukan kemampuan semua agenda lain. Prioritas keempat adalah konektivitas fisik dan digital yang menurunkan biaya kepulauan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks prioritas reformasi 2026-2030, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Prioritas kelima adalah transformasi hijau dan ketahanan iklim. Investasi yang dilakukan hari ini akan mengunci struktur energi dan kota selama puluhan tahun. Standar, pembiayaan, dan perlindungan transisi harus dibangun sekarang. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks prioritas reformasi 2026-2030, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Prioritas keenam adalah integrasi global yang selektif dan strategis. Indonesia perlu memanfaatkan pergeseran rantai pasok sambil meningkatkan kandungan pengetahuan domestik. Sasaran bukan sekadar nilai investasi, melainkan produktivitas, ekspor, keterampilan, dan inovasi. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks prioritas reformasi 2026-2030, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak

selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai prioritas reformasi 2026-2030 memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

25. Skenario Indonesia 2045

Skenario pertama adalah kelanjutan moderat: pertumbuhan bertahan sekitar lima persen, stabilitas terjaga, tetapi produktivitas meningkat lambat. Indonesia menjadi ekonomi besar, namun pendapatan per kapita dan kualitas kerja tertinggal dari aspirasi. Ketimpangan wilayah dan tekanan fiskal tetap besar. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks skenario indonesia 2045, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Skenario kedua adalah reformasi terfragmentasi: beberapa sektor maju cepat, terutama komoditas, digital, dan kawasan tertentu, tetapi keterkaitan domestik lemah. Pertumbuhan meningkat sesaat namun rentan terhadap guncangan, konflik distribusi, dan kerusakan lingkungan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks skenario indonesia 2045, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Skenario ketiga adalah transformasi inklusif: reformasi regulasi, manusia, fiskal, industri, digital, dan hijau saling memperkuat. Produktivitas naik, pekerjaan formal berkembang, ekspor lebih kompleks, dan daerah memiliki mesin pertumbuhan beragam. Ini bukan hasil satu kebijakan, melainkan konsistensi lintas pemerintahan. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks skenario indonesia 2045, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif

antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pilihan skenario bukan ramalan, melainkan konsekuensi institusional. Visi Indonesia Emas memerlukan kemampuan mengatakan tidak pada proyek rendah manfaat, menghentikan program gagal, melindungi kelompok terdampak, dan menjaga reformasi dari penangkapan kepentingan. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks skenario Indonesia 2045, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai skenario Indonesia 2045 memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

26. Kerangka Pengukuran Keberhasilan

Keberhasilan reformasi harus diukur dalam lima lapisan: stabilitas, produktivitas, inklusi, ketahanan, dan kapasitas institusi. Stabilitas mencakup inflasi, fiskal, dan keuangan. Produktivitas mencakup TFP, output per pekerja, investasi teknologi, dan kompleksitas ekspor. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks kerangka pengukuran keberhasilan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Inklusi mencakup pekerjaan formal, upah riil, partisipasi perempuan, mobilitas sosial, kemiskinan, dan akses layanan. Ketahanan mencakup diversifikasi, energi, pangan, iklim, serta kemampuan pemulihan. Kapasitas institusi mencakup penerimaan pajak, kualitas regulasi, waktu layanan, pengadaan, dan kepercayaan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks kerangka pengukuran keberhasilan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan

perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Indikator harus dipilih menurut wilayah, gender, usia, dan kelompok pendapatan. Rata-rata nasional dapat menyembunyikan ketertinggalan. Data administratif dan survei perlu diintegrasikan dengan perlindungan privasi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks kerangka pengukuran keberhasilan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Evaluasi reformasi harus memungkinkan koreksi. Kebijakan tidak perlu dipertahankan demi reputasi jika bukti menunjukkan kegagalan. Budaya belajar merupakan bagian dari kapasitas negara dan kepemimpinan. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks kerangka pengukuran keberhasilan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai kerangka pengukuran keberhasilan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

27. Kesimpulan

Reformasi struktural adalah kunci peningkatan ekonomi Indonesia karena sumber pertumbuhan berikutnya harus berasal dari produktivitas, kualitas manusia, inovasi, dan institusi. Ketahanan makro yang telah dibangun memberikan ruang, tetapi ruang itu harus digunakan untuk perubahan yang meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks kesimpulan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak;

menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Agenda reformasi mencakup industri, regulasi, persaingan, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, fiskal, daerah, infrastruktur, digital, UMKM, keuangan, perdagangan, pertanian, energi, kota, dan birokrasi. Nilainya terletak pada keterhubungan. Reformasi parsial dapat saling meniadakan jika tidak dirancang sebagai sistem. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks kesimpulan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Reformasi yang efektif harus teknis sekaligus politis: berbasis bukti, terurut, transparan, memiliki perlindungan transisi, dan menantang rente. Pertumbuhan yang lebih tinggi tidak boleh dibeli dengan ketimpangan, kerusakan lingkungan, atau pelemahan institusi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks kesimpulan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pada akhirnya, reformasi struktural adalah proses membangun kemampuan nasional untuk belajar, beradaptasi, dan menciptakan nilai. Ia bukan proyek sekali selesai, melainkan disiplin pemerintahan dan masyarakat. Indonesia memiliki skala, demografi, sumber daya, dan posisi geopolitik yang kuat; tugas reformasi adalah mengubah potensi tersebut menjadi produktivitas, kesejahteraan, dan martabat yang berkelanjutan. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks kesimpulan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai kesimpulan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang

bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

28. Sintesis Integratif: Arsitektur Reformasi Struktural Indonesia

Koherensi kebijakan

Reformasi yang berjalan sendiri-sendiri dapat menciptakan kontradiksi. Insentif investasi kehilangan pengaruh ketika logistik buruk; pendidikan vokasi tidak efektif ketika perusahaan tidak tumbuh; digitalisasi pajak sulit diterima ketika layanan publik rendah; dan transisi energi terhambat ketika struktur harga mempertahankan konsumsi karbon. Arsitektur reformasi harus memetakan ketergantungan antarkebijakan, menentukan urutan, dan memastikan bahwa satu perubahan memperkuat perubahan lain. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Reformasi yang berjalan sendiri-sendiri dapat menciptakan kontradiksi. Insentif investasi kehilangan pengaruh ketika logistik buruk; pendidikan vokasi tidak efektif ketika perusahaan tidak tumbuh; digitalisasi pajak sulit diterima ketika layanan publik rendah; dan transisi energi terhambat ketika struktur harga mempertahankan konsumsi karbon. Arsitektur reformasi harus memetakan ketergantungan antarkebijakan, menentukan urutan, dan memastikan bahwa satu perubahan memperkuat perubahan lain. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Reformasi yang berjalan sendiri-sendiri dapat menciptakan kontradiksi. Insentif investasi kehilangan pengaruh ketika logistik buruk; pendidikan vokasi tidak efektif ketika perusahaan tidak tumbuh; digitalisasi pajak sulit diterima ketika layanan publik rendah; dan transisi energi terhambat ketika struktur harga mempertahankan konsumsi karbon. Arsitektur reformasi harus memetakan ketergantungan antarkebijakan, menentukan urutan, dan memastikan bahwa satu perubahan memperkuat perubahan lain. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang,

keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Disiplin prioritas

Keterbatasan anggaran dan kapasitas menuntut pilihan. Pemerintah perlu membedakan program yang bersifat simbolik dari reformasi yang mengubah insentif. Prioritas sebaiknya diberikan kepada fondasi yang memiliki efek lintas sektor: kualitas pembelajaran, kesehatan primer, administrasi pajak, data, persaingan, kepastian regulasi, konektivitas, dan kapasitas birokrasi. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Keterbatasan anggaran dan kapasitas menuntut pilihan. Pemerintah perlu membedakan program yang bersifat simbolik dari reformasi yang mengubah insentif. Prioritas sebaiknya diberikan kepada fondasi yang memiliki efek lintas sektor: kualitas pembelajaran, kesehatan primer, administrasi pajak, data, persaingan, kepastian regulasi, konektivitas, dan kapasitas birokrasi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Keterbatasan anggaran dan kapasitas menuntut pilihan. Pemerintah perlu membedakan program yang bersifat simbolik dari reformasi yang mengubah insentif. Prioritas sebaiknya diberikan kepada fondasi yang memiliki efek lintas sektor: kualitas pembelajaran, kesehatan primer, administrasi pajak, data, persaingan, kepastian regulasi, konektivitas, dan kapasitas birokrasi. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Keadilan transisi

Setiap reformasi memiliki distribusi biaya dan manfaat. Keadilan tidak berarti mempertahankan semua struktur lama, tetapi memastikan orang memiliki perlindungan dan kesempatan untuk beradaptasi. Bantuan tunai, pelatihan, mobilitas, layanan kerja, dan investasi wilayah dapat membuat perubahan lebih adil sekaligus lebih tahan secara politik. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga

perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Setiap reformasi memiliki distribusi biaya dan manfaat. Keadilan tidak berarti mempertahankan semua struktur lama, tetapi memastikan orang memiliki perlindungan dan kesempatan untuk beradaptasi. Bantuan tunai, pelatihan, mobilitas, layanan kerja, dan investasi wilayah dapat membuat perubahan lebih adil sekaligus lebih tahan secara politik. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Setiap reformasi memiliki distribusi biaya dan manfaat. Keadilan tidak berarti mempertahankan semua struktur lama, tetapi memastikan orang memiliki perlindungan dan kesempatan untuk beradaptasi. Bantuan tunai, pelatihan, mobilitas, layanan kerja, dan investasi wilayah dapat membuat perubahan lebih adil sekaligus lebih tahan secara politik. Dari sudut ketahanan, desain perlu mempertimbangkan guncangan perdagangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan geopolitik. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Kepemimpinan adaptif

Reformasi memerlukan pemimpin yang mampu memberi arah, mendengar bukti, mengelola konflik, dan mengakui ketidakpastian. Kepemimpinan adaptif berbeda dari kontrol administratif; ia membangun kapasitas kolektif untuk memecahkan masalah yang tidak memiliki jawaban tunggal. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Reformasi memerlukan pemimpin yang mampu memberi arah, mendengar bukti, mengelola konflik, dan mengakui ketidakpastian. Kepemimpinan adaptif berbeda dari kontrol administratif; ia membangun kapasitas kolektif untuk memecahkan masalah yang tidak memiliki jawaban tunggal. Dari sudut ketahanan, desain perlu mempertimbangkan guncangan perdagangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan geopolitik. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang,

keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Reformasi memerlukan pemimpin yang mampu memberi arah, mendengar bukti, mengelola konflik, dan mengakui ketidakpastian. Kepemimpinan adaptif berbeda dari kontrol administratif; ia membangun kapasitas kolektif untuk memecahkan masalah yang tidak memiliki jawaban tunggal. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Kontrak sosial produktif

Masyarakat bersedia membayar pajak dan menerima perubahan ketika percaya bahwa negara adil, kompeten, dan transparan. Dunia usaha bersedia berinvestasi jangka panjang ketika aturan dapat diprediksi dan persaingan tidak dibajak. Pekerja bersedia beradaptasi ketika ada keamanan dan peluang. Kontrak sosial produktif menghubungkan kewajiban dengan manfaat. Dari sudut ketahanan, desain perlu mempertimbangkan guncangan perdagangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan geopolitik. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Masyarakat bersedia membayar pajak dan menerima perubahan ketika percaya bahwa negara adil, kompeten, dan transparan. Dunia usaha bersedia berinvestasi jangka panjang ketika aturan dapat diprediksi dan persaingan tidak dibajak. Pekerja bersedia beradaptasi ketika ada keamanan dan peluang. Kontrak sosial produktif menghubungkan kewajiban dengan manfaat. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Masyarakat bersedia membayar pajak dan menerima perubahan ketika percaya bahwa negara adil, kompeten, dan transparan. Dunia usaha bersedia berinvestasi jangka panjang ketika aturan dapat diprediksi dan persaingan tidak dibajak. Pekerja bersedia beradaptasi ketika ada keamanan dan peluang. Kontrak sosial produktif menghubungkan kewajiban dengan manfaat. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang

adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Pembelajaran kebijakan

Indonesia memerlukan infrastruktur evaluasi yang lebih kuat: data administratif yang dapat digunakan secara aman, eksperimen, evaluasi dampak, audit kinerja, dan forum pembelajaran. Kebijakan yang gagal harus dapat dihentikan tanpa dianggap sebagai kegagalan politik total. Kemampuan koreksi adalah tanda institusi matang. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Indonesia memerlukan infrastruktur evaluasi yang lebih kuat: data administratif yang dapat digunakan secara aman, eksperimen, evaluasi dampak, audit kinerja, dan forum pembelajaran. Kebijakan yang gagal harus dapat dihentikan tanpa dianggap sebagai kegagalan politik total. Kemampuan koreksi adalah tanda institusi matang. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

Indonesia memerlukan infrastruktur evaluasi yang lebih kuat: data administratif yang dapat digunakan secara aman, eksperimen, evaluasi dampak, audit kinerja, dan forum pembelajaran. Kebijakan yang gagal harus dapat dihentikan tanpa dianggap sebagai kegagalan politik total. Kemampuan koreksi adalah tanda institusi matang. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Implementasi memerlukan indikator hasil, peta risiko, mekanisme pengaduan, serta publikasi kemajuan yang dapat diuji oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini mengurangi jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman warga maupun perusahaan. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antardaerah; standar nasional harus jelas, sedangkan dukungan teknis dan ruang adaptasi perlu disediakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan diukur dari kemampuan institusi mempertahankan perbaikan melewati perubahan pejabat dan siklus politik.

29. Glossarium

Agglomerasi: Pemusatan aktivitas ekonomi yang meningkatkan produktivitas melalui kedekatan perusahaan, pekerja, pemasok, dan pengetahuan.

Alokasi sumber daya: Proses penempatan tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi ke berbagai kegiatan produksi.

Bonus demografi: Potensi pertumbuhan yang muncul ketika proporsi penduduk usia kerja relatif besar.

Common-mode risk: Risiko satu kejadian atau kelemahan bersama melumpuhkan beberapa sistem yang dianggap terpisah.

Deregulasi: Penghapusan atau penyederhanaan aturan yang tidak efektif; bukan penghilangan seluruh regulasi.

Ekonomi hijau: Sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan sambil mengurangi emisi, polusi, dan kerusakan ekosistem.

Ekonomi informal: Aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya tercakup dalam registrasi, perpajakan, atau perlindungan ketenagakerjaan formal.

Eksternalitas: Dampak aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak tercermin sepenuhnya dalam harga pasar.

Flexicurity: Kombinasi fleksibilitas pasar kerja dengan keamanan pendapatan, jaminan sosial, dan dukungan transisi kerja.

Formalisasi: Proses usaha atau pekerja masuk ke sistem legal, administratif, pajak, dan perlindungan resmi.

Hilirisasi: Peningkatan pengolahan dan nilai tambah sumber daya sebelum dijual, idealnya disertai pendalaman teknologi.

Kapasitas negara: Kemampuan pemerintah merumuskan, melaksanakan, menegakkan, dan mengevaluasi kebijakan.

Kompleksitas ekonomi: Tingkat keragaman dan kandungan pengetahuan produk serta kemampuan produktif suatu ekonomi.

Land value capture: Pemanfaatan sebagian kenaikan nilai tanah akibat investasi publik untuk membiayai pembangunan.

Misalokasi: Keadaan ketika sumber daya tidak mengalir kepada penggunaan atau perusahaan yang paling produktif.

Produktivitas total faktor: Bagian pertumbuhan output yang berasal dari efisiensi, teknologi, organisasi, dan pengetahuan, bukan sekadar penambahan input.

Reformasi struktural: Perubahan institusi, aturan, dan insentif yang meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi jangka panjang.

Rente ekonomi: Pendapatan berlebih yang diperoleh karena kekuasaan pasar, privilese, atau pembatasan, bukan karena produktivitas.

Spillover teknologi: Penyebaran pengetahuan atau teknologi dari satu perusahaan atau sektor kepada pihak lain.

Transformasi struktural: Perubahan komposisi produksi dan pekerjaan menuju kegiatan bernilai tambah dan berproduktivitas lebih tinggi.

Value for money: Penilaian apakah hasil sosial-ekonomi sepadan dengan biaya dan risiko yang ditanggung pemerintah.

30. Daftar Pustaka

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401.
<https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>

- Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., & Howitt, P. (2005). Competition and innovation: An inverted-U relationship. *Quarterly Journal of Economics*, 120(2), 701–728. <https://doi.org/10.1093/qje/120.2.701>
- Badan Pusat Statistik. (2026a). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026c). Indeks Pembangunan Manusia 2025. BPS-Statistics Indonesia.
- Bloom, N., & Van Reenen, J. (2007). Measuring and explaining management practices across firms and countries. *Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1351–1408. <https://doi.org/10.1162/qjec.2007.122.4.1351>
- Cirera, X., & Maloney, W. F. (2017). The innovation paradox: Developing-country capabilities and the unrealized promise of technological catch-up. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1160-9>
- Dabla-Norris, E., Ho, G., Kochhar, K., Kyobe, A., & Tchaidze, R. (2013). Anchoring growth: The importance of productivity-enhancing reforms in emerging market and developing economies. IMF Staff Discussion Note, 13/08. <https://doi.org/10.5089/9781484384954.006>
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *Quarterly Journal of Economics*, 114(1), 83–116. <https://doi.org/10.1162/003355399555954>
- Hsieh, C.-T., & Klenow, P. J. (2009). Misallocation and manufacturing TFP in China and India. *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1403–1448. <https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.4.1403>
- International Monetary Fund. (2026). Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia. IMF Country Report No. 2026/010. <https://doi.org/10.5089/9798229035576.002>
- McMillan, M., Rodrik, D., & Verduzco-Gallo, Í. (2014). Globalization, structural change, and productivity growth, with an update on Africa. *World Development*, 63, 11–32. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.012>
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>
- Rodrik, D. (2008). Second-best institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100–104. <https://doi.org/10.1257/aer.98.2.100>
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1–33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- World Bank. (2025). Indonesia economic prospects: People-first housing—A roadmap from homes to jobs to prosperity in Indonesia. World Bank.
- World Bank. (2025). Indonesia economic prospects: Digital foundations for growth. World Bank.
- World Bank. (2026). Indonesia economic prospects: Managing risks, unlocking productivity. World Bank.